PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA CIPTA GERAK SENI TARI KHAS BALI (JOGED BUMBUNG)

Niluh Nopa Arianti, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

email: ariantinova901@gmail.com

Gusti Ayu Arya Prima Dewi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

email: aryaprimadewi@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i08.p07>

ABSTRAK

Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk menyumbangkan wawasan yang mendalam terkait perlindungan hukum terhadap karya seni tari tradisional khususnya joged bumbung, sebagai Langkah penting dalam mempertahankan identitas budaya dan kekayaan seni Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa joged bumbung merupakan salah satu bentuk ciptaan yang dilindungi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun demikian, sebagai suatu ciptaan, tarian joged bumbung tidak boleh bertentangan dengan norma agama, norma susila, ketertiban umum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Jika terdapat unsur pornografi dalam pementasan tari joged bumbung, maka dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Kata Kunci: *Perlindungan hukum, Hak Cipta, joged bumbung*

ABSTRACT

The purpose of this journal is to contribute indepeneth insights into the legal protection of traditional dance artworks, especially joged bumbung, as a crucial step in preserving the cultural indentity and artistic richness of Indonesia. This research employs a normative legal research method, a study that discusses and analyzes based on applicable laws. The legal apporoach in this study refers to copyright laws and several related regulations. Legal protection has been stipulated in various international and national laws however, in reality, these regulations are not effectively implemented in society, leading to numerous violations that persist to this day. The lack of awerness among the public and the inadequate enforcement of existing regulations contribute to this situation.

Keywords: *Legal protection, copyright, joged bumbung*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang mempunyai keanekaragaman budaya dengan berbagai macam bentuk dan jenis seni yang unik dari tiap daerahnya. Dari berbagai jenis kesenian tradisional yang ada yaitu Tari tradisional, kesenian sendiri merupakan bagian yang dimiliki oleh masyarakat sebagai suatu budaya sebagai bentuk ekspresi individu atau kelompok yang dimiliki oleh masing - masing daerah dengan karakter yang berbeda beda.¹Tari tradisional adalah tari yang telah mengalami perihal

¹ Shania, Intan dan Sri Walny Rahayu. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Tarian Tradisional Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 di Provinsi Aceh *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 1, no. 2 (2017): 59-69".

perjalanan hidup yang rentan lama serta merupakan ciri khas dari suatu daerah² yang membutuhkan perlindungan, pemeliharaan dan pelestarian agar terjaganya kualitas dan nilai-nilai luhur yang nantinya agar dapat dinikmati oleh generasi berikutnya, tari tradisional yang adalah satu dari sekian warisan budaya yang rentan menjadi korban atas kelalaian dan kesadaran akan pentingnya suatu nilai budaya tradisional sehingga menjadi suatu kasus seperti klaim dan modifikasi pada tari-tari tradisional.³ Kearifan lokal yang merupakan suatu produk dalam suatu masyarakat yang timbul dari adanya kebutuhan akan moral, aturan serta nilai untuk menjadi contoh kinerja dalam suatu tindakan,⁴ pentingnya tari tradisional selain sebagai suatu alat komunikasi tari tradisional juga sebagai suatu alat hiburan⁵, Seni tari merupakan unsur yang tak terpisahkan dari kekayaan budaya Bali, sebuah pulau di Indonesia yang dikenal dengan warisan budayanya yang beragam. Seni tari merupakan seni pertunjukan yang harus mendapatkan perlindungan dari hak cipta.⁶ Salah satu bentuk seni tari yang banyak dikenal oleh masyarakat luas adalah joged bumbung, sebuah⁷ tari tradisional Bali yang tidak hanya memikat perhatian karena keindahan gerakannya, tetapi juga karena nilai-nilai budaya yang tercermin di dalamnya, Gerakan yang gemulai dan musik yang khas menjadi ciri dari tarian ini, menciptakan pengalaman seni yang menarik dan unik.

Hak cipta sekiranya dapat memberikan nilai terhadap suatu seni dan memiliki manfaat bagi keberlangsungan hidup masyarakat. Namun di tengah pesatnya modernisasi dan globalisasi, seni budaya tradisional sering kali menghadapi tantangan serius. Adopsi unsur-unsur asing dan komersialisasi seni yang dapat mengancam integritas serta warisan budaya lokal, joged bumbung sebagai bagian yang tak terpisahkan dari seni tari Bali menghadapi resiko serupa. Pertumbuhan teknologi dan akses global terhadap karya seni membuat perlindungan terhadap hak cipta menjadi semakin penting, namun memang pada dasarnya tari ini dominan masyarakat umum mengetahui sebagai tari hiburan tanpa memancarkan nilai-nilai ketuhanan yang dapat disebut budaya *profan* sebagai penyeimbang dari budaya sakral.⁸ Tetapi dalam konteks ini tari joged bumbung merupakan warisan dari budaya tradisional yang layak serta patut untuk dipertahankan keberadaannya serta sejarah dari terciptanya tarian joged bumbung sehingga tidak mengurangi makna dari tarian tersebut.

² Yeningsih, T. K, *Pendidikan Seni Tari: Buku Untuk Mahasiswa*. (Banda Aceh, Syiah Kuala University Press, 2018), 30.

³ Wijaya, I. Putu Rio, Ni Putu Rai Yuliantini, Dewa Gede Sudika Mangku, dan Muhamad Jodi Setianto. "Upaya Pelestarian Tari Tradisional Bangsa Indonesia Dari Segi Hukum Yang Bersumber Dari Hukum Internasional." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 8, no. 2 (2022): 669-678.

⁴ Rahim, E. I. "Penguatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Adat Desa Bongo Melalui Penyuluhan Terkait Pelestarian Kearifan Lokal dan Hukum Adat Masyarakat". *Jurnal Abdidias* 3, no. 4 (2022): 702-709.

⁵ Mangku, D. G. S. "Perlindungan Hukum Terhadap Tari Tradisional Sebagai Warisan Budaya Bangsa Indonesia Ditinjau Dari Hukum Internasional. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 1 (2021): 97-10".

⁶ Ibrahim, M. Y. "Perlindungan Hak Cipta Tari Tradisional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta". *Fenomena* 18, no. 1 (2020): 2032-2047.

⁷ Nariasih, N. P. E., Mahendrawati, N. L., & Widiati, I. A. P. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Tari Pendet Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014". *Jurnal Analogi Hukum* 3, no. 1 (2021): 111-115.

⁸ Prathama, Anak Agung Gede Agung Indra, Ketut Rai Marthania Onassis, dan I. Gusti Agung Made Dwi Komara. "Perlindungan Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual Komunal Dalam Masyarakat Bali". *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* 6, no. 1 (2023): 21-33.

Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat Bali dalam kehidupan sehari-hari nampaknya bertumpu pada seni dan budaya setempat, Keberagaman budaya yang ada dan visual Bali telah berkontribusi cukup besar pada ketenaran globalnya. Pesta Kesenian Bali (PKB) yang dikenal juga dengan Festival Kebudayaan Bali merupakan acara kebudayaan tahunan terbesar di Bali. Termasuk tarian joged bumbung yang selalu ditampilkan dalam pesta kesenian Bali (PKB) tersebut. Hal ini menggambarkan bahwa jika diperhatikan dari Produk Domestik Bruto (PDB), sebuah parameter krusial untuk memahami keadaan ekonomi suatu negara pada periode tertentu per kapita, menyatakan seni dan proses kreatif mempunyai kontribusi yang cukup besar dalam suatu wilayah terlibat dalam kegiatan kreatif yang melengkapi praktik keagamaan dan memberikan hiburan bagi peserta atau masyarakat yang melaksanakan kegiatan tersebut.

Hak kekayaan intelektual harus diperhatikan untuk menjamin keamanannya sebagai pengakuan atas nilai khas dari karya kreatif yang telah diciptakan dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Dalam hal ini Perlindungan hukum terhadap karya cipta gerak seni tari, khususnya joged bumbung, menjadi suatu kebutuhan mendesak. Undang-Undang hak cipta menjadi instrument utama untuk melindungi keaslian serta keunikan karya seni tersebut. Namun implementasi undang-undang ini dalam konteks seni tari tradisional seringkali rumit, kajian hukum yang mendalam terhadap perlindungan hukum terkait joged bumbung tidak hanya relevan untuk melestarikan seni tari Bali, tetapi juga memiliki dampak yang lebih luas dalam konteks perlindungan hak cipta terhadap warisan budaya lokal di tengah arus globalisasi yang terus berkembang, hingga maraknya kasus dalam masyarakat terkait tari joged bumbung yang dibawakan tidak sesuai dengan pakem (tata Gerakan) yang sesungguhnya hingga tidak layak di pertontonkan dan disebut berbau pornografi, telah banyaknya dilakukannya plagiasi oleh daerah luar atau luar wilayah Bali dipertunjukkan dan dipertontonkan tidak sesuai dengan pakem aslinya sehingga menimbulkan pro dan kontra di Tengah masyarakat luas.

Dalam artikel ini digunakan beberapa artikel pembandingan yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya terkait pembahasan yang berkaitan dengan penelitian ini. Artikel pertama yang dibuat oleh I Kadek Sukadana dan Gusti Ayu Putu Nia Priyantini dengan judul "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Geguritan Bali di Indonesia" pembahasan didalamnya lebih spesifik terkait Pengaturan perlindungan hukum terhadap Geguritan Bali menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta).⁹ Artikel kedua yang dibuat oleh Ni Putu Epy, Ni Luh Mahendrawati, dan Ida Ayu Putu Widiati, dengan judul "Perlindungan Hukum Hak Cipta Tari Pendet Menurut UU Hak Cipta". Studi dimaksud mengkaji perihal perlindungan hukum atas tari pendet berdasarkan UU Hak Cipta dan implikasi hukum yang timbul bila terjadi pelanggaran hak cipta tari pendet. Ekspresi budaya tradisional dilindungi secara hukum berdasarkan ketentuan Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 UU Hak Cipta.¹⁰

⁹ Putra, I. Kadek Sukadana, dan Gusti Ayu Putu Nia Priyantini. "Perlindungan Hak Cipta terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Geguritan Bali di Indonesia. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 3, no. 2 (2021): 108-119"

¹⁰ Cipta, H. "Perlindungan Hukum Atas Karya Tari Abuang di Desa Tenganan Pegringsingan sebagai Satu Bentuk Ekspresi Budaya Tradisional dalam Perspektif Hak Cipta". *Jurnal Harian Regional* 9, no. 6 (2020): 1-12.

Salah satu perbedaan utama dari dua artikel diatas adalah dari segi substansi pengkajian yang dimana penelitian ini lebih menekankan terkait objek yang menjadi sasaran yaitu tari joged bumbung yang menuai pro kontra dalam masyarakat terkait modifikasi gerakan serta plagiasi yang dilakukan oleh daerah luar sehingga tari joged ini sering dikatakan tari yang bernuansa pornografi dan tidak patut untuk di pertontonkan dengan gerakan tersebut sehingga nantinya dalam penegakan hukum yang terjadi di masyarakat dan dapat terlaksanakan maka bisa merubah kembali gerakan sesuai dengan pakem agar senantiasa budaya bali tidak terjerumus dan terpengaruh budaya barat dengan adanya joged bumbung ini karena kurangnya kesadaran dan implementasi dari undang-undang yang telah di ciptakan dan seni tari khususnya joged bumbung ini kerap kali di cari serta di peroleh tanpa seizin dan tidak memberikan kontribusi terhadap pencipta, negara maupun masyarakat dari asal tari tersebut.¹¹

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada penjelasan atas masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya, terdapat dua pernyataan masalah yang bisa diidentifikasi, yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap karya cipta gerak seni tari bali, khususnya tari joged bumbung?
2. Faktor apa sajakah yang menyebabkan timbulnya pandangan negatif yang mengarah ke pornografi terhadap tari joged bumbung di Bali hingga menuai pro dan kontra di dalam masyarakat?

1.3. Tujuan Penulisan

Terdapat suatu tujuan dalam penulisan jurnal ini yaitu menyumbangkan wawasan yang mendalam terkait perlindungan hukum terhadap karya seni tari tradisional khususnya joged bumbung, sebagai langkah penting dalam mempertahankan identitas budaya dan kekayaan seni Indonesia.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan adalah metode penelitian hukum normatif. Dalam pendekatan ini, objek penelitian memfokuskan pada keadaan hukum intrinsik, terutama aturan hukum atau kaidah hukum. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mempelajari dan mengevaluasi asas-asas hukum, khususnya kaidah hukum positif, dengan merujuk pada literatur hukum yang tersedia. Pendekatan dalam penelitian ini mencakup pendekatan peraturan perundang-undangan, di mana setiap peraturan yang mengatur masalah hukum yang sedang diteliti dianalisis secara mendalam. Selain itu, digunakan juga pendekatan konseptual, yang melibatkan studi tentang doktrin-doktrin hukum, definisi-definisi hukum, teori-teori hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang sedang diuji.¹²

¹¹ Ramadhan, R. A. "Perlindungan Warisan Budaya Seni Tari Melinting Masyarakat Adat Lampung dalam Perspektif Sistem Hukum Kekayaan Intelektual". *Jurnal Fak Hukum Unila* 1, no. 1 (2020): 19-27.

¹² Djulaeka. *Metode Penelitian Hukum*. (Surabaya, Scopindo Media Pustaka, 2019), 32.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Perlindungan Hukum terhadap Karya Cipta Gerak Seni Tari Bali Khususnya Tari Joged Bumbung

Dalam perspektif kebudayaan, klaim suatu kepemilikan asset kebudayaan adalah Tindakan yang mencabut kebudayaan secara eksklusif berdasarkan tempatnya,¹³ Dalam hukum internasional sendiri terdapat beberapa konvensi yang telah mengatur terkait perlindungan hukum tradisional yang memiliki 4 (empat) konvensi, diantaranya *Convention on Biological Diversity* (CBD) tahun 1992 yang memberikan arahan tentang cara melindungi Pengetahuan tradisional melalui berbagai ketentuan, contohnya Pasal 8 (j) yang membicarakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat asli dan lokal yang mencerminkan cara hidup tradisional, Pasal 17 (2) yang menekankan pengetahuan asli dan tradisional, serta Pasal 18 (4) yang menegaskan kewajiban untuk mendorong kolaborasi dalam penggunaan teknologi, termasuk teknologi tradisional. Di samping itu, *United Nations Educational Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) dan *World Intellectual Property Organization* (WIPO) juga turut memperhatikan isu ini dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan warisan budaya tak benda dan kekayaan intelektual pertunjukan artistik. Demikian pula *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS) menegaskan perlindungan terhadap karya seni dan sastra, termasuk koreografi, sesuai dengan ketentuan Konvensi Berne.

Terdapat beberapa ketentuan terkait perlindungan tari tradisional di Indonesia antara lain UU Hak Cipta, Perpres Nomor 78 Tahun 2007 mengenai pengesahan konvensi untuk perlindungan warisan budaya tak benda tahun 2003, Permendikbud Nomor 106 Tahun 2013 Tentang warisan budaya tak benda Indonesia, Keppres No. 19 Tahun 1997 tentang WIPO *Copy right treaty* (WCT). Implementasi secara materiil di Indonesia sendiri telah digelar acara tahunan yaitu menari di Gallery Indonesia kaya. Departemen kebudayaan telah melakukan beragam langkah, mencakup permintaan kepada pemerintah daerah untuk mencatatkan kekayaan intelektual, pengetahuan tradisional, dan ekspresi budaya tradisional.

Seperti yang telah diuraikan dalam Undang-Undang Hak cipta, sesungguhnya telah memiliki dasar yang cukup kuat dalam konstitusi tertulis nasional yakni UUD 1945. Atas dasar ketentuan konstitusional ini, reposisi Hak Kekayaan Intelektual sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia, khususnya Hak Asasi Budaya, menemukan dasar terkuat di tingkat nasional. Pasal-Pasal yang mendasari hak-hak tersebut antara lain: Pasal 18 B (1) dan (2) UUD 1945 dan Pasal 18 B Ayat (1) dan (2) UUD 1945 secara lengkap menyatakan bahwa:

1. Negara mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang khusus atau khusus yang ditentukan dengan undang-undang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
2. Negara mengakui dan menghormati masyarakat yang diatur berdasarkan hukum adat dan hak tradisionalnya selama anggota masyarakat tersebut masih hidup.

¹³ Febriantini, K. D., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. "Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Warisan Budaya Indonesia yang Diklaim oleh Negara Lain". *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 3 (2022): 206-213.

Dalam UU Hak Cipta yang pada Pasal 38 ayat (1) menyatakan bahwa Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara dan pada ayat (2) Kewajiban negara untuk menginventarisasi ekspresi budaya serta menjaga pelestarian dan promosinya diuraikan dalam Bab V, Bagian 1 (satu): Ekspresi Budaya Tradisional dan Hak Cipta atas Ciptaan Penulis Tak Dikenal. Apabila Pencipta tidak diketahui dan Ciptaan belum diterbitkan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (1), Negara wajib melindungi Hak Cipta untuk kepentingan Pencipta. Dalam pasal 38 ayat (1) tersebut disebut kata Negara, namun dalam konteks negara apakah pemerintah daerah yang berwenang atau pemerintah pusat dalam hal Negara wajib melindungi Hak Cipta untuk kepentingan Pencipta Apabila Pencipta tidak diketahui dan Ciptaan belum diterbitkan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (1) Sehingga Hal tersebut dapat dikategorikan sebagai kekaburan norma ketidakjelasan terkait Kata negara yang dalam hal ini mencakup pemerintah daerah atau pemerintah pusat.

Dalam hal ini joged bumbung merupakan suatu tarian yang dibuat melalui cerita rakyat yang dimana telah diciptakan untuk merayakan suatu keberhasilan dengan suasana bergembira, Adanya kepercayaan bahwa gerakan tari joged akan membawa keberuntungan di banyak daerah di Bali, maka dahulu tari joged dianggap sebagai tarian sakral.¹⁴ Di Bali, tari Joged ditampilkan dalam dua gaya berbeda yang disebut Joged Bumbung dan Joged Pingitan. perlu ditekankan bahwa hal ini harus diperhatikan oleh Pemerintah dengan banyaknya beredar kasus joged bumbung yang menuai pro kontra di lingkungan masyarakat dikarenakan pekem tarian yang di rubah oleh Pemeran dengan iringan musik atau gambelan yang khas dan hanya mementingkan suatu nilai uang yang didapatkan setelah menarikannya. Tidak melihat dampak dari gaya tarian yang berubah dan mengarah dalam konteks pornografi sehingga hal tersebut tidak patut dipertontonkan dan di pertunjukan untuk masyarakat umum. Yang kerap terjadi di lapangan banyak dari anak di bawah umur yang melihat gerakan yang tidak patut di tiru sehingga akan berdampak negatif kepada generasi muda terutama anak di bawah umur.

3.2 Faktor yang Menyebabkan Timbulnya Pandangan Negatif yang Mengarah ke Pornografi Terhadap Tari Joged Bumbung di Bali Hingga Menuai Pro dan Kontra di Dalam Masyarakat

Tari Joged bumbung Biasanya akan mengajak penonton lawan jenis untuk ikut serta dalam tarian kelompok yang disebut ngibing di tengah pertunjukan. Pemandu dipilih secara acak dan diberikan selendang untuk dikenakan di pinggang sebagai tanda bahwa mereka harus mulai menari. Beberapa pengunjung akan diundang oleh masing-masing penari secara bergantian hingga waktu yang ditentukan habis.¹⁵ Bentuk visual pakaian tari Bali dihasilkan melalui seni visual fotografi yang dikemas dalam fashion fotografi dengan metode studio *outdoor* dan *indoor*, sehingga mampu memberikan kesan indah secara visual, tradisional, dan menyenangkan. Hasil akhirnya akan menampilkan berbagai gaya pakaian tari Bali yang terkenal karena

¹⁴ Paramisuari, A. A. S., & Purwani, S. P. M. "Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional dalam Bingkai Rezim Hak Cipta". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2019): 1-16.

¹⁵ A.A. Premana, I.G.M. Darmawiguna dan G.A. Pradnyana, "Film Dokumenter Menipis Julukan negatif Joged Bumbung". *Karmapati (Kumpulan Artikel Mahasiswa Pendidikan Teknik Informatika)* 8, no. 2 (2019): 46-456.

metode produksinya terinspirasi oleh kajian tentang perubahan pakaian tari Bali seiring berjalannya waktu. Karena rutinitas tariannya diubah menjadi tarian yang jelek dan berlebihan, dengan alasan untuk mencari uang, Tari joged sering dianggap berlebihan oleh masyarakat. Hal ini dipicu oleh peraturan di Bali yang mengatur di mana, kapan, dan bagaimana tarian-tarian ini boleh dipentaskan secara bersamaan.

Sangatlah memprihatinkan, terdapat banyak hal yang dapat di banggakan dari bali, tetapi dengan adanya hal seperti ini mempertunjukkan gerakan tari yang tidak pantas dapat merusak nama bali khususnya daerah-daerah di bali yang disebut desa pekraman yang menjadi komponen krusial dalam pelestarian tradisi seni tari joged bumbung bali. Tari joged bumbung ini menjadi bukti nyata bahwa hubungan seks bebas tidak diterima oleh masyarakat bali khususnya yang beragama hindu sehingga banyaknya penolakan dan pandangan negatif terkait joged bumbung saat ini. Desa pekraman sendiri diberikan kewenangan yang besar sebagaimana tertuang dalam peraturan daerah provinsi bali nomor 3 tahun 2001 tentang desa pekraman, menurut peraturan daerah ini dimana ritual dan agama hindu dapat berkembang dan Lestari karena adanya desa pekraman. Para pemuka dari masing-masing banjar adat harus bekerjasama dalam membangun prejuru desa yang dipimpin oleh kelihan adat guna menyaring masuknya budaya barat yang dapat mengikis budaya tradisional.

Ternyata faktor yang menyebabkan timbulnya pandangan negatif dan menuai pro kontra dalam Masyarakat terkait tari joged ini karena tersebarnya di media sosial tanpa kendali, yang telah di unggah oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, dan mempublikasikannya di berbagai laman media sosial dengan pakem dan gerakan yang tidak pantas, joged bumbung kini telah dijadikan sebagai media di dalam mencari popularitas dan menghina keberadaan seni sendiri.¹⁶ Sehingga masyarakat di luar bali yang tidak tahu terkait kebenarannya akan memberikan pandangan negatif terhadap sisi gelap dari bali, terkait tayangan yang menyebar luas adalah bentuk penyimpangan dari tarian joged yang mempergunakan aksi pornografi, vulgar, dan tidak bermoral, maka tidak heran jika Masyarakat merasa terganggu dengan hal tersebut. Maka perlu adanya perhatian khusus terkait hal ini dan mengambil tindakan nyata guna keberlangsungan jangka panjang dari nama baik tradisi dan budaya khususnya di bali.

Salah satu cara untuk mencegahnya adalah dengan membuat pararem yang melarang pertunjukan tari joged bumbung yang memperlihatkan gerakan pornografi di depan umum dimulai dengan langkah kecil untuk memberikan pengarahan kepada para penari dan kepada Masyarakat yang mengundang atau menyewa agar diberikan himbauan oleh kelian adat atau kepala desa setempat dalam penggelaran pementasannya, pemerintah bisa memberi hukuman pidana kepada siapa saja yang terlibat dalam pertunjukan joged bumbung yang menampilkan materi pornografi, setelah menjatuhkan sanksi adat dan administratif. Pasal 36 jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang pornografi menerangkan bahwa "setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menganggambarkannya ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan atau yang bemuatan pornografi lainnya dapat dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)".¹⁷

¹⁶I. N. Winyana. "Seni Tradisi Joged Bumbung diantara Tontonan Estetik dan Etik". *Jurnal Penelitian Agama* 1, no. 1 (2015): 64-75.

¹⁷ N.G.A.D. Satyawati. "Tarian Joged Bumbung: Diskursus Konsep Hukum Warisan Budaya Tak Benda". *Jurnal Magister Hukum Udayana* 11, no. 4 (2022): 912-927.

Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali, sebuah unit pelaksana teknis di bawah naungan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mengambil langkah strategis yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Salah satu tindakan strategis yang diambil adalah melalui inisiatif pemajuan kebudayaan dengan fokus pada perlindungan, pemanfaatan, dan pemeliharaan nilai-nilai budaya, yang direalisasikan melalui penyelenggaraan Festival Budaya Tradisional Bali. Langkah ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang No 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Melalui tindakan strategis ini, Balai aktif dalam mempromosikan dan memperkaya warisan budaya Bali dengan menggelar berbagai seni tradisional Bali.¹⁸ serta melarang penduduk setempat melakukan pertunjukan tari joged Bumbung yang bernuansa pornografi yang nantinya perlahan akan Kembali kepada pakem yang seharusnya dan dapat memberikan dampak positif, menjadikan Bali sebagai suatu daerah yang kaya tradisi dengan moral dan etika yang Tinggi.

4. Kesimpulan

Joged bumbung merupakan suatu tarian yang dibuat melalui cerita rakyat yang dimana telah diciptakan untuk merayakan suatu keberhasilan dengan suasana bergembira, Adanya kepercayaan bahwa gerakan tari joged akan membawa keberuntungan di banyak daerah di Bali, maka dahulu tari joged dianggap sebagai tarian sakral. Joged bumbung merupakan salah satu bentuk ciptaan yang dilindungi berdasarkan ketentuan UU Hak Cipta. Namun demikian, sebagai suatu ciptaan, tarian joged bumbung tidak boleh bertentangan dengan norma agama, norma susila, ketertiban umum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Pada kenyataannya di Bali, tari Joged ditampilkan dalam dua gaya berbeda yang disebut Joged Bumbung dan Joged Pingitan, dengan banyaknya beredar kasus joged bumbung yang menuai pro kontra di lingkungan Masyarakat dikarenakan pekem tarian yang di rubah oleh Pemeran dengan iringan musik atau gambelan yang khas dan hanya mementingkan suatu nilai uang yang didapatkan setelah menarikannya, Tidak melihat dampak dari gaya tarian yang berubah dan mengarah dalam konteks pornoaksi, vulgar dan tidak beretika sehingga hal tersebut tidak patut dipertontonkan dan di pertunjukan untuk masyarakat umum. Yang kerap terjadi di lapangan banyak dari anak di bawah umur yang melihat gerakan yang tidak patut di tiru sehingga akan berdampak negatif kepada generasi muda terutama anak di bawah umur, dalam peraturan internasional ataupun nasional telah dibuat secara terperinci implementasi dalam masyarakat pula harus dilakukan dengan Tindakan nyata maka perlu adanya penggerak untuk menghimbau dan mensosialisasikan agar masyarakat khususnya Bali paham dan mengetahui terkait peraturan yang telah dibuat, dan sanksi adat ,sanksi administratif dapat diterapkan dalam pelanggarannya bahkan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi untuk dapat memberikan edukasi dan implementasi nyata, sehingga tari joged Bumbung yang bernuansa pornografi yang nantinya perlahan akan Kembali kepada pakem yang seharusnya dan dapat memberikan dampak positif, menjadikan Bali sebagai suatu

¹⁸ Wakhyuningngarsih. (2018), "Pagelaran Seni Tradisional Bali, Mengembalikan Joged Bumbung Sesuai Pakem". "<https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbbali/pagelaran-seni-tradisional-bali-mengembalikan-joged-bumbung-sesuai-pakem/> (25 November 2023)".

daerah yang kaya tradisi dengan moral dan etika yang Tinggi. Jika terdapat unsur pornografi dalam pementasan tari joged bumbung, maka dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Djulaeka. Metode Penelitian Hukum. Surabaya, Scopindo Media Pustaka, 2019.
Yeniningsih, T. K, *Pendidikan Seni Tari: Buku Untuk Mahasiswa*. Banda Aceh, Syiah Kuala University Press, 2018.

Jurnal

- A.A. Premana, I.G.M. Darmawiguna dan G.A. Pradnyana, "Film Dokumenter MENIPIS Julukan negatif Joged Bumbung". *KARMAPATI (Kumpulan Artikel Mahasiswa Pendidikan Teknik Informatika)* 8, no. 2 (2019): 46-456.
- Cipta, H. "Perlindungan Hukum Atas Karya Tari Abuang di Desa Tenganan Pegringsingan sebagai Satu Bentuk Ekspresi Budaya Tradisional dalam Perspektif Hak Cipta". *Jurnal Harian Regional* 9, no. 6 (2020): 1-12.
- Febriantini, K. D., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. "Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Warisan Budaya Indonesia yang Diklaim oleh Negara Lain". *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 3 (2022): 206-213.
- I. N. Winyana. "Seni Tradisi Joged Bumbung diantara Tontonan Estetik dan Etik". *Jurnal Penelitian Agama* 1, no. 1 (2015): 64-75.
- Ibrahim, M. Y. "Perlindungan Hak Cipta Tari Tradisional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta". *Fenomena* 18, no. 1 (2020): 2032-2047.
- Mangku, D. G. S. "Perlindungan Hukum Terhadap Tari Tradisional Sebagai Warisan Budaya Bangsa Indonesia Ditinjau Dari Hukum Internasional". *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 1 (2021): 97-10.
- N.G.A.D. Satyawati. "Tarian Joged Bumbung: Diskursus Konsep Hukum Warisan Budaya Tak Benda". *Jurnal Magister Hukum Udayana* 11, no. 4 (2022): 912-927.
- Nariasih, N. P. E., Mahendrawati, N. L., & Widiati, I. A. P. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Tari Pendet Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014". *Jurnal Analogi Hukum* 3, no. 1 (2021): 111-115.
- Paramisuari, A. A. S., & Purwani, S. P. M. "Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional dalam Bingkai Rezim Hak Cipta". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2019): 1-16.
- Prathama, Anak Agung Gede Agung Indra, Ketut Rai Marthania Onassis, dan I. Gusti Agung Made Dwi Komara. "Perlindungan Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual Komunal Dalam Masyarakat Bali." *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* 6, no. 1 (2023): 21-33.
- Putra, I. Kadek Sukadana, dan Gusti Ayu Putu Nia Priyantini. "Perlindungan Hak Cipta terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Geguritan Bali di Indonesia". *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 3, no. 2 (2021): 108-119.
- Rahim, E. I. "Penguatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Adat Desa Bongo Melalui Penyuluhan Terkait Pelestarian Kearifan Lokal dan Hukum Adat Masyarakat". *Jurnal Abdidas* 3, no. 4 (2022): 702-709.

- Ramadhan, R. A. "Perlindungan Warisan Budaya Seni Tari Melinting Masyarakat Adat Lampung dalam Perspektif Sistem Hukum Kekayaan Intelektual". *Jurnal Fak Hukum Unila* 1, no. 1 (2020): 19-27.
- Shania, Intan dan Sri Walny Rahayu. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Tarian Tradisional Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 di Provinsi Aceh". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 1, no. 2 (2017): 59-69.
- Wijaya, I. Putu Rio, Ni Putu Rai Yuliantini, Dewa Gede Sudika Mangku, dan Muhamad Jodi Setianto. "Upaya Pelestarian Tari Tradisional Bangsa Indonesia Dari Segi Hukum Yang Bersumber Dari Hukum Internasional". *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 8, no. 2 (2022): 669-678.

Internet

- Wakhyuninggarsih. (2018), "Pagelaran Seni Tradisional Bali, Mengembalikan Joged Bumbung Sesuai Pakem". <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbbali/pagelaran-seni-tradisional-bali-mengembalikan-joged-bumbung-sesuai-pakem/> (25 November 2023).

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928).
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).
- Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan Convention for The Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage (Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 81).
- Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan WIPO Copyrights Treaty.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1486).
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 29).